

**LAPORAN PENELITIAN MADYA
BIDANG KBA**



**KAJIAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL
DITINJAU DARI ASPEK PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN PURWOREJO)**

Oleh:

Enceng
Liestyodono Brianto
Purwaningdyah MW

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2011**





**Lembar Pengesahan
Penelitian Madya Bidang KBA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Terbuka**

1. a. Judul Penelitian : Kajian Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Ditinjau dari Aspek Penerimaan Keuangan Daerah (Studi di Kabupaten Purworejo)
- b. Bidang Penelitian : KBA
- c. Klasifikasi Penelitian : Madya
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap & Gelar : Drs. Enceng, M.Si
b. NIP : 19600716 199303 1 001
c. Golongan Kepangkatan : IV/a
d. Jabatan Akademik, Fakultas, dan Unit Kerja : Lektor Kepala, FISIP, Jurusan Ilmu Administrasi
e. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
3. Anggota Peneliti :
a. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
b. Nama Anggota dan Unit Kerja : Liestyodono B Irianto, FISIP-UT dan Purwaningdyah, UPBJJ Padang
c. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
4. a. Periode Penelitian : 2011
b. Lama Penelitian : 8 (delapan) Bulan
5. Biaya Penelitian : Rp.20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah)
6. Sumber Biaya : Universitas Terbuka
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : Perbaikan Bahan Ajar

Mengetahui,
Dekan FISIP-UT

Daryono, SH, MA, PhD
NIP. 131866185

Menyetujui,
Ketua LPPM

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP. 19660508 199201 1 003

Pondok Cabe, November 2011
Ketua Peneliti,

Enceng
NIP 19600716 199303 1 001

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si
NIP. 19570422 198605 2 001

REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Kajian Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Ditinjau dari Aspek Penerimaan Keuangan Daerah (Studi di Kabupaten Purworejo)
2. Rekomendasi Pemanfaatan Hasil Penelitian Untuk Pengayaan Bahan Ajar diberikan untuk:

Mata Kuliah : Keuangan Publik
Judul Modul : Keuangan Publik
SKS : 3 sks
Kode Matakuliah : IPEM4440

Mata Kuliah : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Judul Modul : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SKS : 2 sks
Kode Matakuliah : PAJA3345

Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Muatan dalam mata kuliah Keuangan Publik, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pokok bahasan tentang keuangan daerah perlu dilengkapi dengan landasan teoritis desentralisasi fiskal keuangan daerah dan contoh konkrit pelaksanaan desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya penerimaan keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Purworejo dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya penerimaan keuangan daerah dan cara mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis, dan diuji keabsahannya dengan melakukan *check*, *recheck* dan *cross check* terhadap data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo sebagian besar dananya masih bersumber dari Pemerintah Pusat, dengan rata-rata mencapai 82,68 % per tahun sedangkan PAD hanya mencapai 7,99 % per tahun. Hal ini berarti derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Purworejo masih sangat rendah.

Kata kunci : *desentralisasi fiskal, keuangan daerah, kemandirian daerah.*

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRACT

Problem of this research is to find out how the implementation of fiscal decentralization particularly in the local financial revenue comes from the main local revenue (PAD), and Regional Fund Balance and Loan in the District of Purworejo. This study aims at reviewing the implementation of fiscal decentralization particularly at the local financial revenues derived from the sources of local revenue in the District of Purworejo. Beside that, it also examines the constraints faced by the District Government particularly at fiscal decentralization and local revenues and how the government solves it.

This research used a qualitative descriptive method. The data taken are the primary and secondary data. Data collected is by doing in-depth interviews and documentation. The data were then analyzed using descriptive analytical techniques of data analysis, and tested its validity by doing checking, rechecking and cross checking.

The results show that the local financial revenue in the District of Purworejo, most of the funds, comes from the Central Government, with an average of 82.68% per year, while the PAD is only 7.99%. This also shows that the degree of fiscal decentralization and financial independence in the District of Purworejo are still very low.

Key words: fiscal decentralization, local financial, local autonomy.

KATA PENGANTAR

Penelitian tentang ” *Kajian Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Ditinjau Dari Aspek Penerimaan Keuangan Daerah (Studi di Kabupaten Purworejo)* ” ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya penerimaan keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Purworejo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan menjadi umpan balik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal menuju kemandirian daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo pada masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, November 2011

Peneliti
Ketua

Enceng
NIP 196007161993031001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Rekomendasi Hasil Penelitian	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
Bab II Tinjauan Pustaka	8
2.1. Otonomi Daerah	8
2.2. Desentralisasi Fiskal	9
2.3. Urgensi Keuangan Daerah	15
Bab III Metode Penelitian	22
3.1. Tipe Penelitian	22
3.2. Sumber dan Jenis Data	22
3.2.1. Sumber Data	22
3.2.2. Jenis Data	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data	22
3.4. Teknik Analisis Data	23
3.5. Jadwal Penelitian	23
Bab IV Hasil dan Pembahasan	24
4.1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian	24
4.2. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Purworejo	25
4.3. Analisis Desentralisasi Fiskal Ditinjau Dari Aspek Penerimaan Keuangan Daerah	39
4.3.1. Analisis Penerimaan Keuangan dari PAD	39
4.3.2. Analisis Penerimaan keuangan Daerah Dari Dana Perimbangan Keuangan	50
4.3.3. Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Purworejo	52
4.3.4. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Cara Mengatasinya	57
Bab V Kesimpulan dan Saran	64
5.1. Simpulan	64
5.2. Saran	64
Daftar Pustaka	66
Lampiran	67

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009 DAN 2010	3
Tabel III.1.	JADWAL RENCANA KEGIATAN	23
Tabel IV.1.a.	REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008	29
Tabel IV.1.b.	REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009	31
Tabel IV.1.c.	REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010	34
Tabel IV.2.	SUMBER PENDAPATAN DAN DASAR HUKUM PENGENAAN PEMUNGUTAN DI KABUPATEN PURWOREJO	38
Tabel IV.3.a.	PAD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008	40
Tabel IV.3.b.	PAD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2009	41
Tabel IV.3.c.	PAD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2010	41
Tabel IV.4.	KONTRIBUSI KOMPONEN PAD TERHADAP TOTAL PAD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 – 2010	46
Tabel IV.5.	PERTUMBUHAN PAD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008 – 2010	48
Tabel IV.6.	KEMAMPUAN PAD DALAM APBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 – 2010	48
Tabel IV.7.	KEMAMPUAN PAD TERHADAP BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM APBD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 – 2010	49
Tabel IV.8.	DANA PERIMBANGAN KEUANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 – 2010	50
Tabel IV.9.	PERSENTASE KONTRIBUSI SETIAP KOMPONEN DANA PERIMBANGAN TERHADAP TOTAL DANA PERIMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 – 2010	51
Tabel IV.10.	PERSENTASE DANA PERIMBANGAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 – 2010	52
Tabel IV.11.	PERBANDINGAN PAD, BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK, DAU DAN DAK TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 – 2010	53
Tabel IV.12.	PERBANDINGAN PAD DENGAN DANA EKSTERN (DANA PERIMBANGAN) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 – 2010	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan sistem desentralisasi yang lebih mengedepankan prinsip otonomi daerah menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan (*reform*) dan pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tertib dan transparan (*good governance*), terutama dalam memenuhi pelayanan publik.

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa dampak perubahan terhadap sistem administrasi pemerintahan daerah maupun sistem administrasi keuangannya. Masalah perubahan tersebut menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa, konsekwensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah. Di samping itu, alasan klasik seperti kesiapan sumber daya manusia (SDM) di daerah, masih lemahnya struktur dan infrastruktur daerah memang merupakan kenyataan yang tidak dipungkiri dan dialami oleh beberapa pemerintah daerah. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia.

Dalam rangka desentralisasi fiskal tersebut, maka salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) pada satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah, sebagaimana

dikemukakan oleh Mardiasmo (2002 :103). Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

Suwandi (2003:3), mengemukakan bahwa kapasitas keuangan Pemerintah Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan pembangunan (*development function*) dan perlindungan masyarakat (*protective function*).

Selanjutnya Smith (1979:214) mengemukakan pula pendapatnya tentang faktor-faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu "fungsi/tugas pemerintah, kemampuan pemungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan dan personil." Sejalan dengan pendapat itu, Fernandez (1992:26-36) mengemukakan argumennya tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan Otonomi Daerah yang mencakup : "institusi, keuangan dan aparat Pemerintah Daerah."

Agar Pemerintah Daerah mampu memelihara serta mengembangkan penyelenggaraan otonominya, maka Pemerintah Daerah harus mampu merespon perubahan-perubahan fundamental atau strategik yang terjadi di lingkungannya. Dampak yang timbul dari perubahan kebutuhan masyarakat adalah makin bengkaknya biaya yang dibutuhkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Persoalannya adalah bahwa pertumbuhan pelayanan sering tidak seiring dengan laju pertumbuhan penerimaan daerah. Untuk sedapat mungkin mampu mengimbangi pertumbuhan pelayanan masyarakat tersebut, maka perlu dipikirkan terobosan untuk pengelolaan keuangan daerah agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagaimana dikemukakan oleh Suwandi (2003:20).

Iglesias (1978:69), mengemukakan pendapatnya bahwa faktor-faktor yang dapat memprediksi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonominya terdiri dari : "*resources* (sumber daya), *structure* (struktur),

technology (teknologi), *support* (dukungan) dan *leadership* (kepemimpinan)". Sejalan dengan pendapat tersebut, Riwu Kaho (1997:60) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah antara lain meliputi :

1. Manusia pelaksanaanya harus baik yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, kemampuan aparatur dan partisipasi masyarakat;
2. Keuangan harus cukup baik, terutama PAD-nya;
3. Peralatan harus cukup tersedia;
4. Organisasi dan manajemen harus baik.

Dengan demikian, salah satu aspek yang penting dalam mengisi dan melaksanakan kewenangan dalam otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah.

Berdasarkan pengamatan awal, kebijakan yang dijalankan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah di bidang keuangan daerah lebih banyak ditekankan pada aspek pembelanjaan dibanding aspek penerimaan. Lebih jelasnya akan digambarkan besar penerimaan keuangan daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 dan 2010, yang merupakan gambaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Kabupaten Purworejo berikut:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran 2009 dan 2010

No	Uraian	2009	2010
1.	PENDAPATAN		
a	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 42.874.969.676,00	Rp. 47.480.960.386,00
b	Dana Perimbangan	Rp.604.368.903.623,00	Rp.629.890.484.802,00
c	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 48.122.346.424,00	Rp. 35.283.949.000,00
	Jumlah pendapatan	Rp.695.366.219.723,00	Rp.712.655.394.188,00
2.	BELANJA		
a.	Belanja Tidak Langsung		
	1) Belanja pegawai	Rp. 472.323.463.316,00	Rp.504.214.867.250,00
	2) Belanja bunga	Rp. 115.000.000,00	Rp. 115.000.000,00

	3) Belanja subsidi	Rp. -	Rp. -
	4) Belanja Hibah	Rp. 26.148.894.544,00	Rp. 24.201.658.000,00
	5) Belanja bantuan sosial	Rp. 4.095.000.000,00	Rp. 5.035.000.000,00
	6) Belanja bagi hasil	Rp. 352.750.000,00	Rp. 352.750.000,00
	7) Belanja bantuan Keuangan	Rp. 33.371.522.000,00	Rp. 37.475.514.000,00
	8) Belanja tidak terduga	Rp. 14.093.150.921,00	Rp. 2.500.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 550.499.780.781,00	Rp. 573.894.789.250,00
b.	Belanja Langsung		
	1) Belanja pegawai	Rp. 22.789.824.545,00	Rp. 20.653.971.600,00
	2) Belanja barang dan jasa	Rp. 88.202.060.550,00	Rp. 66.873.879.430,00
	3) Belanja modal	Rp. 111.823.449.475,00	Rp. 93.299.527.700,00
	Jumlah Belanja Langsung	Rp. 222.815.334.570,00	Rp. 180.827.178.730,00
	Jumlah Belanja	Rp. 773.315.115.351,00	Rp. 754.721.967.930,00
	Surplus /(Defisit)	Rp. 77.948.895.628,00	Rp. 42.066.573.792,00
3.	PEMBIAYAAN		
a.	Penerimaan	Rp. 94.534.466.928,00	Rp. 58.948.042.684,00
b.	Pengeluaran	Rp. 16.585.571.300,00	Rp. 10.468.178.440,00
	Jumlah pembiayaan netto	Rp. 77.947.895.628,00	Rp. 48.479.864.244,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan(SiLPA)	Rp. 15.758.581.484,00	Rp. 6.413.290.452,00

Data tersebut menunjukkan bahwa peranan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung penerimaan daerahnya masih sangat kecil, dimana pada tahun 2009 Realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai Rp.42.874.969.676,00. Salah satu sebab kecilnya pendapatan asli daerah tersebut karena minimnya objek pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi pada tahun 2010 mulai adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari Rp.42.874.969.676,00 meningkat menjadi Rp. 47.480.960.386,00. Tetapi peningkatan tersebut masih menggambarkan

tingkat ketergantungan Daerah Kabupaten Purworejo yang masih sangat besar terhadap Pemerintah Pusat, dimana besarnya bantuan pusat melalui Dana Alokasi Umum masih sangat besar yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 515.796.414.000,00 dan tahun 2010 sebesar Rp. 526.630.040.000,00. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*,
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah,
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum,
4. Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi,
5. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat dan dapat meningkatkan otonomi serta keleluasan daerah (*local discretion*). Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) sebenarnya hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara PAD dengan Dana Perimbangan. Namun perlu juga dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Anggaran yang dibuat besar jumlahnya namun tidak dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip *value for money*) justru akan menimbulkan masalah,

misalnya kebocoran anggaran. Yang terpenting adalah optimalisasi anggaran, karena peran pemerintah daerah lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah (Osborne and Gaebler, 1993). Masyarakat daerah sendiri (termasuk swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dan sebagainya) akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang mempunyai potensi yang besar dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Namun demikian, sumber-sumber penerimaan keuangan daerah belum mendapat perhatian yang serius dan pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu adanya suatu kajian terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Purworejo. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : *Kajian Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Ditinjau Dari Aspek Penerimaan Keuangan Daerah (Studi di Kabupaten Purworejo)*.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah di Kabupaten Purworejo.
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, khususnya penerimaan keuangan daerah dan cara mengatasinya.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. mengkaji pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya penerimaan keuangan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Purworejo.

- b. mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya penerimaan keuangan daerah dan cara mengatasinya.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu pemerintahan dan perpajakan, khususnya Keuangan Publik dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan dan meningkatkan desentralisasi fiskal.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat Indonesia telah biasa menjalankan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi. Namun demikian, kajian mengenai kemampuan otonomi yang dilaksanakan suatu daerah otonom, jarang dilakukan. Selain karena belum ada tolok ukur baku, daerah otonom yang terbentuk di Indonesia lebih didasarkan pada pertimbangan faktor sejarah dan politik, belum didasarkan pada pertimbangan faktor yang komprehensif. Padahal pada era sekarang ini diperlukan standarisasi agar dapat diketahui posisi sesuatu dibandingkan lainnya. Hasil dari kajian kemampuan penyelenggaraan otonomi dapat digunakan oleh daerah bersangkutan untuk melakukan mawas diri sehingga dapat disusun strategi dan program daerah yang tepat agar kemampuan otonominya dari waktu ke waktu terus meningkat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya seperti kapasitas sumber daya (alam, manusia, dan buatan), kewenangan yang mampu dijalankannya, pelayanan yang mampu diberikan kepada masyarakat, dan kapasitas akuntabilitas yang mampu diberikan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dikemukakan bahwa untuk melakukan penilaian tingkat kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonominya, setiap tahun daerah harus menyampaikan data kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dan rentang kendali kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri. Namun, peraturan pemerintah ini tidak dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi karena peraturan pemerintah ini lebih diarahkan untuk standarisasi pembentukan daerah otonom baru. Salah satu cara untuk melakukan kajian terhadap tingkat kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonominya adalah melalui desentralisasi fiskal.

2.1. Otonomi Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa

perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal senada diungkapkan Sedarmayanti (2003:22) yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ryas Rasyid (1998 : 48) mengartikan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan untuk memenuhi fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Jika dilihat sebagai hak, otonomi daerah berfungsi sebagai alat dan cara untuk membuat daerah atau masyarakat mandiri (Idrha,2002 : 186-187).

Pelaksanaan otonomi daerah menurut Kaho (2005 : 60) dipengaruhi oleh faktor manusia pelaksananya, keuangan, peralatan, organisasi dan manajemennya. Sementara itu, Suwandi (2003 : 3) mengemukakan bahwa kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Lebih lanjut, Fernandez (1992 :26-36) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi adalah institusi, keuangan dan aparat pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam hal keuangan daerah.. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan Aldeefier dalam Lains (1995 : 39) dan Munir (2004 :2).

2.2. Desentralisasi Fiskal

Litvack dan Seddon (1999 : 2) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat kepada pihak lain baik kepada daerah bawahan, organisasi

pemerintahan semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Cheema dan Rondinelli (1983). Litvack dan Seddon membagi desentralisasi menjadi empat tipe, yaitu :

a. Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik bertujuan agar semangat demokratisasi yang berkembang di masyarakat dapat tersalur secara positif. Melalui desentralisasi, masyarakat luas dapat berpartisipasi aktif dalam proses perumusan, pembuatan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, serta memanfaatkan hasilnya. Melalui desentralisasi politik dibentuk badan-badan perwakilan yang dipilih oleh masyarakat yang berfungsi menjalankan fungsi perwakilan, pembuatan kebijakan, serta fungsi pengawasan politik terhadap badan penyelenggara pemerintahan.

b. Desentralisasi Administratif

Desentralisasi administrasi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien. Melalui cara ini dapat dipilah dan dipilih aktivitas-aktivitas pemerintahan yang dapat ditransfer kepada pejabat-pejabat lain di luar pejabat pemerintah pusat yang ada di ibukota negara.

c. Desentralisasi Ekonomi atau Pasar

Desentralisasi ekonomi pasar atau pasar dilakukan dalam bentuk privatisasi atau deregulasi dengan mengalihkan tanggung jawab berbagai fungsi dari sektor publik ke sektor privat.

d. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen inti dari desentralisasi. Untuk menjalankan kewenangan yang telah ditransfer, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Bentuknya dapat berupa pembiayaan sendiri (*self financing*) dengan mengadakan pungutan, pembiayaan bersama, perluasan sumber-sumber lokal melalui pajak atau retribusi, transfer antar pemerintahan, serta pinjaman atau bantuan.

Secara harfiah, istilah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud bisa tercermin pada kedua sisi anggaran; penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *Tax Policy*. Di sisi pengeluaran, daerah akan

mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana perimbangan. Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendiri. Desentralisasi Fiskal menurut Elmi (2005 : 26) adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan keuangan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan kebijakan Desentralisasi Fiskal diharapkan akan tercipta pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Desentralisasi Fiskal juga merupakan salah satu “pilar” dalam memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, karena dengan adanya transfer dana ke daerah akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah.

Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal antara lain:

- (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan Pemerintah Daerah;
- (2) dapat memenuhi aspirasi dari Daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional;
- (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat Daerah;
- (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar Daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap Daerah;
- (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pelaksanaan Desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*;
- b. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.

Desentralisasi Fiskal dapat dikelompokkan menjadi

- a. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan dan pemerataan serta memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam;
- b. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (*subsidiary loan*) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah intinya menyatakan bahwa Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah.

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi. PAD sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing.

2). Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

a). Dana Bagi Hasil (DBH)

Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas Daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Di samping itu, bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan dana reboisasi.

b). Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

c). Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

3). Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi Keuangan Daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, Pinjaman Daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Di lain pihak, Pinjaman Daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu, dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah. Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Daerah sepenuhnya.

4). Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Dalam lain-lain pendapatan adalah hibah. Hibah dapat berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Di samping itu, Pemerintah juga memberikan dana darurat. Pemberian Dana Darurat kepada Daerah karena bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan Dana Darurat pada Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu Daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, Pemerintah dapat memberikan

Dana Darurat kepada Daerah tersebut setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

2.3. Urgensi Keuangan Daerah

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama sebagai sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Dasril Munir, 2004 : 96). Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Manullang dalam Dasril Munir (2004 : 92) menyatakan bahwa bagi suatu pemerintahan daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hal senada diungkapkan oleh Pamudji dalam Kaho (2005 :138) bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Faktor keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Demikian pentingnya faktor keuangan dalam agenda penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keuangan daerah menempati posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah dan bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada posisi tingkat keotonomian suatu daerah karena dengan kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakikat otonomi daerah dan kemampuan daerah berotonomi memerlukan kemampuan dukungan keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Kaho (2005 : 138) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah

- (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Lebih lanjut, Syamsi (1986 : 199) menyatakan bahwa ukuran untuk mengetahui kemampuan suatu daerah otonom dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) adalah

- a. Kemampuan struktural organisasinya
Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas.
- b. Kemampuan aparatur pemerintah daerah
Aparatur pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang ingin dicapai oleh daerah.
- c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.
- d. Kemampuan keuangan daerah
Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber dananya antara lain PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kemampuan keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Penilaian kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Penggunaan ukuran derajat desentralisasi fiskal menurut Reksohadiprojo (2000: 201) menggunakan ukuran perbandingan PAD dengan total

penerimaan daerah (TPD), perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) untuk daerah dengan total penerimaan daerah dalam persentase. Ukuran-ukuran derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

a. PAD

$$\frac{\text{-----}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

TPD

b. BHPBP

$$\frac{\text{-----}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

TPD

c. Sumbangan Daerah (SB)

$$\frac{\text{-----}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

TPD

$$\text{TPD} = \text{PAD} + \text{BHPBP} + \text{SB}$$

Berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Di samping itu, menurut Radianto (1997 : 42) untuk mengkaji derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan Indeks Kemampuan Rutin (IKR). IKR adalah proporsi (rasio) antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat. Pengeluaran rutin adalah anggaran belanja aparatur daerah di luar gaji dan tunjangan PNS.

Pada sisi lain, Musgrave dan Musgrave (1991) menyatakan bahwa dalam menilai kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan formula sebagai berikut :

1) PAD

TPD

2) BHPBP

TPD

3) Sum

TPD

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat kemandirian daerah untuk melihat seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2002), dengan formula sebagai berikut:

4) PAD

TKD

5) PAD

KR

6) PAD + BHPBP

TKD

7) PAD + BHPBP

TKD

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

TPD = Total penerimaan Daerah

TKD = Total Pengeluaran Daerah

KR = Pengeluaran Rutin

Sum = Sumbangan dari Pusat

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah

yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Lebih lanjut, Halim (2002:128-135) menjelaskan bahwa cara untuk menilai keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menganalisis Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun analisis rasio keuangan tersebut meliputi :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dan efisiensi PAD dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Asli Daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan sesuai potensi daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Aktivitas

- a. Rasio Keserasian, rasio ini menggambarkan pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

- b. Penyerapan Dana per Triwulan, penyerapan dana per triwulan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan secara periodik atas kegiatan yang direncanakan pada masing-masing triwulan.
4. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*), mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Apabila realisasi penerimaan pendapatan per triwulan dikurangi realisasi pengeluaran per triwulan terjadi surplus dan sementara penyerapan dana untuk pengeluaran terbesar terjadi pada triwulan terakhir berarti beban kerja pelaksanaan pembangunan terpusat pada triwulan terakhir.

Berdasarkan formula-formula yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa hasil analisis rasio keuangan ini merupakan tolak ukur dalam ;

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal yang diberikan kepada daerah,
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah,

3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya,
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah,
5. Melihat pertumbuhan/ perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang didapat dengan pendekatan ini diharapkan lebih mendalam dan rinci. Untuk tujuan tersebut digunakan metode wawancara mendalam.

3.2. Sumber dan Jenis Data

3.2.1. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004 :112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pejabat pemerintah dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.

3.2.2. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah

- (1).Data primer, bersumber dari lapangan berupa informasi dan hasil wawancara dengan para informan yang dianggap memiliki informasi tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal .
- (2).Data sekunder, bersumber dari publikasi resmi dan dokumen tertulis yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah Kabupaten Purworejo.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pimpinan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo seperti Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua BAPPEDA, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Bagian Keuangan, dan Direktur BUMD.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pimpinan yang memiliki informasi tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Untuk pemilihan informan, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan metode tersebut, ditentukan kriteria yang akan digunakan dalam memilih informan.

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi hasil penelitian yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Teknik ini juga memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan objektif yang diatur, diurutkan dan dikelompokkan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkrit dan terperinci.

Pengujian keabsahan data diperlukan untuk memperoleh validitas data. Teknik yang digunakan adalah dengan melakukan *check*, *recheck* dan *cross check* terhadap data yang diperoleh.

3.5. JADWAL KEGIATAN

Tabel III.1. Jadwal Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu/Bulan											
		Feb	Mar	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop				
1	Pengajuan Proposal												
2	Review Proposal												
3	Pengambilan Data												
4	Analisa Data												
5	Laporan dan Penggandaan												

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Purworejo (Bahasa Jawa: *Purwareja*), adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purworejo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di utara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di barat.

Bagian selatan wilayah Kabupaten Purworejo merupakan dataran rendah. Bagian utara berupa pegunungan, bagian dari Pegunungan Serayu. Di perbatasan dengan DIY, membujur Pegunungan Menoreh. Purworejo berada di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa.

Kabupaten Purworejo terdiri atas 16 kecamatan, yang dibagi lagi dalam 494 desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purworejo. Luas kabupaten adalah 1.034,82 km² dengan jumlah penduduk 774.285 dengan kepadatan penduduk 748 jiwa/km². Dasar hukum pendirian Purworejo adalah UU Nomor 13 Tahun 1950.

Aktivitas ekonomi kabupaten ini bergantung pada sektor pertanian, diantaranya padi, jagung, ubi kayu, dan hasil palawija lain. Sentra tanaman padi di Kecamatan Ngombol, Purwodadi, dan Banyuwirip. Jagung terutama dihasilkan di Kecamatan Bruno. Ubi kayu sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Pituruh. Di tingkat provinsi, Purworejo menjadi salah satu sentra penghasil rempah-rempah (Bahasa Jawa: *empon-empon*), yaitu: kapulaga, kemukus, temulawak, kencur, kunyit, dan jahe. Selain untuk bumbu penyedap masakan, juga untuk bahan baku jamu. Empon-empon yang paling banyak dihasilkan Purworejo adalah kapulaga. Sentra produksi di Kecamatan Kaligesing, Loano, dan Bener. Konsumen tanaman empon-empon adalah perajin jamu gendong, pengusaha industri jamu jawa, dan rumah makan. Sekitar 75 pabrik jamu di Jawa Tengah mengandalkan bahan baku dari kabupaten ini. Demikian juga pengusaha jamu tradisional di Cilacap, seperti Jaya Guna, Serbuk Sari, Serbuk Manjur, dan Cap Tawon Sapi. Pembeli biasanya mendatangi sekitar lima toko penyedia bahan jamu di Pasar Baledono. Kecamatan Grabag dikenal sebagai sentra penghasil melinjo yang buahnya dijadikan makanan kecil

yaitu emping. Sedangkan Kecamatan Bener dan Banyuwirip serta Purwodadi dikenal sebagai penghasil durian

Di bidang peternakan, ternak yang menjadi khas Purworejo adalah kambing *peranakan etawa* (PE), yakni kambing dari India yang memiliki postur tinggi besar. Peternakan kambing PE terutama di Kecamatan Kaligesing. Sisanya dari Kecamatan Purworejo, Bruno, dan Kemiri. Di Kecamatan Kaligesing, kambing itu dikawinkan dengan kambing lokal sehingga tercipta kambing PE ras *Kaligesing*. Bagi sebagian besar peternak di Purworejo, memiliki kambing ini merupakan kebanggaan tersendiri, ibarat memiliki mobil mewah. Setiap tahun ribuan kambing dipasarkan ke luar Purworejo, termasuk ke Jawa Timur (Ponorogo, Kediri, Trenggalek), Sumatera (Bengkulu dan Jambi), Riau, serta Kalimantan (Banjarmasin).

Di bidang industri, Purworejo memiliki satu industri tekstil di Kecamatan Banyuwirip. Selain tekstil, di kecamatan ini ada dua industri pengolahan kayu dengan 387 tenaga kerja. Satu industri yang sama dengan 235 tenaga kerja di Kecamatan Bayan. Saat ini hasil industri yang mulai naik daun adalah pembuatan bola sepak. Industri ini mulai dirintis tahun 2002 di Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, bola sepak bermerek *Adiora* itu sudah menembus pasar mancanegara. Meski baru setahun berdiri, pembuatan bola sepak itu mewarnai kehidupan masyarakat Kecamatan Bener. Di Tahun 2007 berdiri cabang dari rokok Sampoerna di kecamatan Bayan yang akan menyerap tenaga kerja cukup banyak

Dalam bidang pariwisata, Purworejo mengandalkan pantainya di sebelah selatan yang bernama "Pantai Ketawang" dan "Pantai Congot", didukung dengan gua-gua : "Gua Selokarang" dan "Sendang Sono", di Sendang Sono (artinya : Kolam di bawah pohon Sono) masyarakat mempercayai bahwa mandi di sendang tersebut akan dapat mempertahankan keremajaan.

4.2. Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Purworejo

Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut, faktor keuangan merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap kegiatan

pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang tersedia, makin besar pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan, demikian pula semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Manullang dalam Dasril Munir dkk (2004 :92) menyatakan bahwa dalam suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Pendapat senada dikemukakan Pamudji dalam Kaho (2005 : 188) bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Faktor keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Demikian pentingnya faktor keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berbagai peraturan tentang hal tersebut telah dibuat dan sudah banyak mengalami perubahan dimana pemerintah melakukan penyesuaian dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan momentum dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, keuangan daerah berada pada posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada tingkat keotonomian suatu daerah karena dengan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakikat otonomi daerah dan kemampuan daerah berotonomi berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk membiayai otonomi tersebut. Kaho (2005 : 138) menyatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang memadai.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. PAD menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena secara ideal PAD diharapkan menjadi penerimaan utama pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sedangkan penerimaan yang bersumber di luar PAD hanya sebagai pendukung. Demikian pula dalam perspektif otonomi daerah, PAD menjadi sumber keuangan utama di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam kaitan ini, Insukindro, dkk (1994:1) mengemukakan bahwa PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah dan dapat dipandang sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat.

PAD belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan yang dominan dalam pengeluaran pemerintah daerah khususnya belanja rutin daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai anggaran belanja daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian suatu daerah dalam rangka membiayai segala urusan otonomi daerah. Dengan demikian, apabila PAD dapat menutupi sebagian besar pengeluaran daerah, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut dapat lebih leluasa dalam menjalankan otonominya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat hanya tercapai apabila sumber utama keuangan daerah untuk membiayai aktivitas daerah berasal dari PAD. Oleh sebab itu, Mardiasmo (2002 : 146) mengemukakan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber PAD harus dikelola

secara ekonomis, berdaya guna dan berhasil guna serta masing-masing komponen PAD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memadai terhadap peningkatan PAD pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, untuk menjalankan otonomi daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Bentuknya dapat berupa pembiayaan sendiri (*self financing*) dengan mengadakan pungutan, pembiayaan bersama, perluasan sumber-sumber lokal melalui pajak atau retribusi, transfer antar pemerintahan, serta pinjaman atau bantuan. Dengan kata lain, diperlukan desentralisasi fiskal. Desentralisasi Fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di Daerah, diharapkan Daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*).

Oleh karena itu, salah satu makna dari desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah merupakan suatu proses untuk mengintensifkan peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.

Berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Purworejo, menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Purworejo, dijelaskan bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo, sumber pembiayaan dari Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi masih mendominasi pembiayaan pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan keadaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, melalui tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008, 2009 dan tahun 2010, sebagai berikut :

TABEL IV.1a
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN		695,366,219,723.00	709,357,094,616.00	13,990,874,893.00
PAD		42,874,969,676.00	51,174,860,039.00	8,299,890,363.00
	Pendapatan Pajak Daerah	6,174,055,000.00	6,402,460,625.00	228,405,625.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	30,837,237,930.00	34,466,896,115.00	3,629,658,185.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,453,121,746.00	1,455,325,294.00	2,203,548.00
	Lain-lain PAD yang Sah	4,410,555,000.00	8,850,178,005.00	4,439,623,005.00
PENDAPATAN TRANSFER		649,991,250,047.00	653,182,234,577.00	3,190,984,530.00
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	604,368,903,623.00	608,506,570,303.00	4,137,666,680.00
	Dana Bagi Hasil Pajak	30,130,954,376.00	34,581,396,879.00	4,450,442,503.00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1,698,535,247.00	1,385,750,421.00	(312,775,823.00)
	Dana Alokasi Umum	515,796,414,000.00	515,796,414,000.00	0.00
	Dana Alokasi Khusus	56,743,000,000.00	56,743,000,000.00	0.00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	9,058,093,200.00	9,058,093,200.00	0.00
	Dana Penyesuaian	9,058,093,200.00	9,058,093,200.00	0.00
	Transfer Pemerintah Provinsi	36,564,253,224.00	35,617,571,074.00	(946,682,150.00)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21,393,241,974.00	20,446,559,824.00	(946,682,150.00)
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	15,171,011,250.00	15,171,011,250.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00
	Pendapatan Dana Darurat	2,500,000,000.00	5,000,000,000.00	2,500,000,000.00
BELANJA		773,315,115,351.00	691,991,234,560.00	(81,323,880,791.00)
	BELANJA OPERASI	647,045,764,955.00	584,770,644,105.00	(62,275,120,850.00)

	Belanja Pegawai	495,113,287,861.00	442,734,511,818.00	(52,378,776,043.00)
	Belanja Barang	88,202,060,550.00	80,961,976,917.00	(7,240,083,633.00)
	Belanja Bunga	115,000,000.00	108,091,788.00	(6,908,212.00)
	Belanja Hibah	26,148,894,544.00	24,848,004,582.00	(1,300,889,962.00)
	Belanja Bantuan Sosial	4,095,000,000.00	3,371,540,000.00	(723,460,000.00)
	Belanja Bantuan Keuangan	33,371,522,000.00	32,746,519,000.00	(625,003,000.00)
	BELANJA MODAL	111,823,449,475.00	106,615,079,531.00	(5,208,369,944.00)
	Belanja Tanah	1,711,415,000.00	1,112,569,350.00	(598,845,650.00)
	Belanja Peralatan dan Mesin	10,788,122,875.00	8,139,137,149.00	(2,648,985,726.00)
	Belanja Bangunan dan Gedung	56,386,991,000.00	55,323,930,400.00	(1,063,060,592.00)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	42,292,753,600.00	41,475,520,400.00	(817,233,200.00)
	Belanja Aset Tetap Lainnya	595,362,000.00	515,722,224.00	(79,639,776.00)
	Belanja Aset Lainnya	48,805,000.00	48,200,000.00	(605,000.00)
	BELANJA TAK TERDUGA	14,093,150,921.00	339,542,700.00	(13,753,608,221.00)
	Belanja Tak Terduga	14,093,150,921.00	339,542,700.00	(13,753,608,221.00)
	TRANSFER	352,750,000.00	265,968,224.00	(86,781,776.00)
	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	352,750,000.00	265,968,224.00	(86,781,776.00)
	Bagi Hasil Retribusi	352,750,000.00	265,968,224.00	(86,781,776.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(77,948,895,628.00)	17,365,860,056.00	95,314,755,684.00
PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH	94,534,466,928.00	94,217,297,642.00	(317,169,286.00)
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	88,209,466,928.00	88,249,297,642.00	39,830,714.00

	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3,325,000,000.00	2,968,000,000.00	(357,000,000.00)
	PENGELUARAN DAERAH	16,585,571,300.00	16,513,571,208.00	(72,000,092.00)
	Pembentukan Dana Cadangan	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,443,000,000.00	6,443,000,000.00	0.00
	Pembayaran Pokok Utang	4,642,571,300.00	4,570,571,208.00	(72,000,092.00)
	Pemberian Pinjaman Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	77,948,895,628.00	77,703,726,434.00	(245,169,194.00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	95,069,586,490.00	95,069,586,490.00

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo

TABEL IV.15
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN	724,177,742,459.00	751,262,475,167.00	27,084,732,708.00
PAD	53,700,577,428.00	60,814,316,979.00	7,113,739,551.00
Pendapatan Pajak Daerah	6,410,000,000.00	6,818,625,592.00	408,625,592.00
Pendapatan Retribusi Daerah	8,866,850,386.00	9,491,483,729.00	624,633,343.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,513,942,042.00	1,516,373,373.00	2,431,331.00
Lain-lain PAD yang Sah	36,909,785,000.00	42,987,834,285.00	6,078,049,285.00
PENDAPATAN TRANSFER	655,181,815,031.00	677,557,808,188.00	22,375,993,157.00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	632,013,592,880.00	634,036,319,961.00	2,022,727,081.00
Dana Bagi Hasil Pajak	33,140,985,636.00	35,088,898,486.00	1,947,912,850.00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya	3,480,567,244.00	3,562,706,475.00	82,139,231.00

	Alam)			
	Dana Alokasi Umum	526,630,040,000.00	526,622,715,000.00	(7,325,000.00)
	Dana Alokasi Khusus	68,762,000,000.00	68,762,000,000.00	0.00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2,957,611,000.00	20,989,411,000.00	18,031,800,000.00
	Dana Penyesuaian	2,957,611,000.00	20,989,411,000.00	18,031,800,000.00
	Transfer Pemerintah Provinsi	20,210,611,151.00	22,532,077,227.00	2,321,466,076.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20,210,611,151.00	22,532,077,227.00	2,321,466,076.00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15,295,350,000.00	12,890,350,000.00	(2,405,000,000.00)
	Pendapatan Dana Darurat	2,500,000,000.00	0.00	(2,500,000,000.00)
	Pendapatan Lainnya	12,795,350,000.00	12,890,350,000.00	95,000,000.00
	BELANJA	808,279,150,509.00	758,043,854,587.00	(50,235,295,822.00)
	BELANJA OPERASI	689,397,127,422.00	647,915,430,962.00	(41,481,696,460.00)
	Belanja Pegawai	531,602,318,343.00	503,253,807,127.00	(28,348,511,216.00)
	Belanja Barang	87,422,702,119.00	80,680,363,677.00	(6,742,338,442.00)
	Belanja Bunga	115,000,000.00	95,370,650.00	(19,629,350.00)
	Belanja Hibah	27,371,592,960.00	23,635,149,008.00	(3,736,443,952.00)
	Belanja Bantuan Sosial	5,410,000,000.00	4,302,412,500.00	(1,107,587,500.00)
	Belanja Bantuan Keuangan	37,475,514,000.00	35,948,328,000.00	(1,527,186,000.00)
	BELANJA MODAL	111,912,089,580.00	110,019,923,725.00	(1,892,165,855.00)
	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00
	Belanja Peralatan dan Mesin	18,500,245,700.00	17,403,321,985.00	(1,096,923,715.00)
	Belanja Bangunan dan Gedung	53,940,386,270.00	53,835,319,770.00	(105,066,500.00)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	38,345,750,010.00	37,690,317,270.00	(655,432,740.00)

	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,125,707,600.00	1,090,964,700.00	(34,742,900.00)
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	BELANJA TAK TERDUGA	6,617,183,507.00	108,500,000.00	(6,508,683,507.00)
	Belanja Tak Terduga	6,617,183,507.00	108,500,000.00	(6,508,683,507.00)
	TRANSFER	352,750,000.00	0.00	(352,750,000.00)
	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	352,750,000.00	0.00	(352,750,000.00)
	Bagi Hasil Retribusi	352,750,000.00	0.00	(352,750,000.00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(84,101,408,050.00)	(6,781,379,520.00)	77,320,028,530.00
PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH	102,069,586,490.00	100,411,586,490.00	(1,658,000,000.00)
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	95,069,586,490.00	95,069,586,490.00	0.00
	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	3,500,000,000.00	3,250,000,000.00	(1,250,000,000.00)
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3,500,000,000.00	3,092,000,000.00	(408,000,000.00)
	PENGELUARAN DAERAH	17,968,178,440.00	8,450,178,348.00	(9,518,000,092.00)
	Pembentukan Dana Cadangan	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,500,000,000.00	0.00	(7,500,000,000.00)
	Pembayaran Pokok Utang	4,468,178,440.00	3,290,178,348.00	(1,178,000,092.00)
	Pemberian Pinjaman Daerah	3,500,000,000.00	2,660,000,000.00	(840,000,000.00)
	PEMBIAYAAN NETTO	84,101,408,050.00	91,961,408,142.00	7,860,000,092.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	85,180,028,622.00	85,180,028,622.00

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo

TABEL IV.1c
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
PENDAPATAN		791,939,417,777.00	802,215,304,045.00	101.30
PAD		66,325,412,769.00	69,609,314,290.00	104.95
	Pendapatan Pajak Daerah	7,972,000,000.00	8,285,157,843.00	103.93
	Pendapatan Retribusi Daerah	13,075,868,737.00	11,576,322,231.00	88.53
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2,289,097,430.00	2,398,632,077.00	104.79
	Lain-lain PAD yang Sah	42,988,446,602.00	47,349,202,139.00	110.14
PENDAPATAN TRANSFER		703,291,062,008.00	710,524,501,855.00	101.03
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	621,922,008,756.00	628,258,498,087.00	101.02
	Dana Bagi Hasil Pajak	34,144,124,165.00	40,235,050,644.00	117.84
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	3,189,103,591.00	3,434,666,443.00	107.70
	Dana Alokasi Umum	528,061,281,000.00	528,061,281,000.00	100.00
	Dana Alokasi Khusus	56,527,500,000.00	56,527,500,000.00	100.00
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	60,256,020,400.00	60,359,670,400.00	100.17
	Dana Penyesuaian	60,256,020,400.00	60,359,670,400.00	100.17
	Transfer Pemerintah Provinsi	21,113,032,852.00	21,906,333,368.00	103.76
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	21,113,032,852.00	21,906,333,368.00	103.76
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		22,322,943,000.00	22,081,487,900.00	98.92
	Pendapatan Dana Darurat	1,000,000,000.00	797,594,900.00	79.76
	Pendapatan Lainnya	21,322,943,000.00	21,283,893,000.00	99.82
BELANJA		879,372,318,430.00	815,892,060,576.00	92.78
	BELANJA OPERASI	788,722,311,968.00	753,579,167,536.00	95.54

	Belanja Pegawai	531,602,318,343.00	503,253,807,127.00	(28,348,511,216.00)
	Belanja Barang	87,422,702,119.00	80,680,363,677.00	(6,742,338,442.00)
	Belanja Bunga	115,000,000.00	95,370,650.00	(19,629,350.00)
	Belanja Hibah	27,371,592,960.00	23,635,149,008.00	(3,736,443,952.00)
	Belanja Bantuan Sosial	5,410,000,000.00	4,302,412,500.00	(1,107,587,500.00)
	Belanja Bantuan Keuangan	37,475,514,000.00	35,948,328,000.00	(1,527,186,000.00)
	BELANJA MODAL	111,912,089,580.00	110,019,923,725.00	(1,892,165,855.00)
	Belanja Tanah	622,550,279,327.00	596,853,486,833.00	95.87
	Belanja Peralatan dan Mesin	92,553,233,041.00	85,975,299,933.00	92.89
	Belanja Bangunan dan Gedung	115,000,000.00	82,219,804.00	71.50
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32,351,282,400.00	31,696,044,693.00	97.97
	Belanja Aset Tetap Lainnya	13,118,370,200.00	12,227,155,768.00	93.21
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	BELANJA TAK TERDUGA	5,528,151,412.00	211,094,000.00	3.82
	Belanja Tak Terduga	5,528,151,412.00	211,094,000.00	3.82
	TRANSFER	122,750,000.00	32,344,324.00	26.35
	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	122,750,000.00	32,344,324.00	26.35
	Bagi Hasil Retribusi	122,750,000.00	32,344,324.00	26.35
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87,432,900,653.00)	(13,676,756,531.00)	15.64
PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH	99,631,829,353.00	99,773,060,322.00	100.14
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	85,180,028,622.00	85,180,028,622.00	100.00

	Pencairan Dana Cadangan	8,072,720,135.00	8,072,720,135.00	100.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	100.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4,129,080,596.00	4,270,311,565.00	103.42
	PENGELUARAN DAERAH	12,198,928,700.00	12,189,138,907.00	99.92
	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7,078,750,000.00	7,078,750,000.00	100.00
	Pembayaran Pokok Utang	2,370,178,700.00	2,360,388,907.00	99.59
	Pemberian Pinjaman Daerah	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	87,432,900,653.00	87,583,921,415.00	100.17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	73,907,164,884.00	0.00

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat masih mendominasi pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo. APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008, 2009 dan 2010 menunjukkan bahwa rata-rata 90,26 % pendapatan daerah berasal dari Pemerintah Pusat, sedangkan PAD Kabupaten Purworejo rata-rata hanya mencapai 9,74 %. Selanjutnya rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan adalah 7,93 % dan kontribusi PAD terhadap belanja hanya mencapai rata-rata 7,92 %. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa PAD Kabupaten Purworejo belum menjadi sumber penerimaan utama pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan yang dominan dalam pengeluaran pemerintah daerah khususnya belanja rutin daerah. Padahal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dituntut kemandirian dari Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu kepada pendapat Halim (2002:128-135) bahwa cara untuk menilai kemandirian keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menganalisis Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah. Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Berdasarkan formula tersebut, maka rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo adalah

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2008 : Rasio Kemandirian} &= \frac{51.174.860.039}{653.182.234.577} = 0,078 \\ \text{b. Tahun 2009 : Rasio Kemandirian} &= \frac{60.814.316.979}{677.557.808.188} = 0,089 \\ \text{c. Tahun 2010 : Rasio Kemandirian} &= \frac{69.609.314.290}{710.524.501.855} = 0,097 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah dari Tim Litbang Depdagri dan FISIPOL UGM, maka kemandirian keuangan daerah Kabupaten Purworejo ditinjau dari aspek penerimaan Daerah pada tahun 2008, 2009 dan 2010 masih *sangat kurang*.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal ditinjau dari aspek penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo, maka yang menjadi tinjauan utama sebenarnya adalah sejauhmana daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang berpotensi bagi penerimaan keuangan daerah. Bupati Purworejo, menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini, Peraturan Daerah yang mendasari pemungutan sumber-sumber PAD berpatokan pada peraturan-peraturan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan dasar hukum pemungutan PAD berdasarkan Peraturan Daerah di Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

TABEL IV.2
SUMBER PENDAPATAN DAN DASAR HUKUM PENGENAAN
PEMUNGUTAN DI KABUPATEN PURWOREJO

No.Urut	Nomor Perda	Perihal
1	Pajak Daerah	
	04 Tahun 2003	Pajak Hotel
	05 Tahun 2003	Pajak Restoran
	04 Tahun 2002	Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet
	05 Tahun 1998	Pajak Hiburan
	03 Tahun 1998	Pajak Reklame
	04 Tahun 1998	Pajak Penerangan Jalan
	06 Tahun 1998	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
2	Retribusi Daerah	
	15 Tahun 2008	Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
	13 Tahun 2008	Retribusi Tempat Khusus Parkir
	17 Tahun 2007	Pengelolaan dan Retribusi Pasar
	15 Tahun 2007	Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
	13 Tahun 2007	Izin Pemakaian Tanah Pengairan
	11 Tahun 2007	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas
	07 Tahun 2007	Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
	06 Tahun 2007	Retribusi Rumah Potong Hewan
	12 tahun 2004	Pendaftaran Perusahaan
	03 Tahun 2004	Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian
	10 Tahun 2003	Izin Usaha Perdagangan
	09 Tahun 2003	Izin Undang-Undang Gangguan

	03 Tahun 2003	Izin Usaha Angkutan
	16 Tahun 2002	Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat
	15 Tahun 2002	Izin Usaha Jasa Konstruksi
	06 Tahun 2002	Retribusi Terminal
	11 Tahun 2001	Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek/Izin Operasi

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Agustus 2011

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kebijakan untuk menggali potensi pendapatan melalui pajak dan retribusi yang bersifat inovatif belum ada. Padahal menurut penjelasan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Purworejo, bahwa salah satu kendala minimnya PAD karena Peraturan Daerah yang ada belum mengakomodir secara maksimal sumber-sumber PAD, di samping lemahnya profesionalisme staf dinas, belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang di lapangan, dan lemahnya koordinasi antar instansi. Akan tetapi kelemahan tersebut justru menjadi suatu tantangan bagi Kabupaten Purworejo untuk berpacu maju mencapai visinya serta mensukseskan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

4.3 Analisis Desentralisasi fiskal Ditinjau Dari Aspek Penerimaan Keuangan Daerah

4.3.1. Analisis Penerimaan Keuangan dari PAD

4.3.1.1. Efektivitas dan Efisiensi PAD

Untuk menganalisis penerimaan keuangan dari sumber PAD, digunakan data APBD 3 (tiga) tahun anggaran terhitung dari tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2010. Analisis PAD dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensinya, dengan menggunakan perhitungan sederhana yang dikemukakan Halim (2002: 129-130) sebagai berikut,

1. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dan efisiensi PAD dapat diformulasikan sebagai berikut.

Realisasi Penerimaan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan sesuai potensi daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

2. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Berdasarkan formula tersebut, data pada tabel berikut akan menggambarkan efektivitas dan efisiensi PAD Kabupaten Purworejo.

TABEL IV.3a
PAD KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2008

No	Uraian	Target	Realisasi
1.	Pajak Daerah	6.174.055.000	6.402.460.625
2.	Retribusi Daerah	30.837.237.930	34.466.896.115
3.	Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.453.121.746	1.455.325.294
4.	Lain-lain PAD yang Syah	4.410.555.000	8.850.178.005
Jumlah Total PAD		42.874.969.676	51.174.860.039

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kab. Purworejo, September 2011

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut, maka terlihat bahwa sumber PAD yang memberikan masukan terbesar terhadap PAD tahun 2008 adalah dari sektor Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp 34.466.896.115,00 atau 67,35% dari total PAD, kemudian diikuti oleh sektor pajak daerah sebesar Rp 6.402.460.625,00 atau 12,51 % dari total PAD.

TABEL IV.3b
PAD KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2009

No	Uraian	Target	Realisasi
1.	Pajak Daerah	6.410.000.000	6.818.625.592
2.	Retribusi Daerah	8.866.850.386	9.491.483.729
3.	Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.513.942.042	1.516.373.373
4.	Lain-lain PAD yang Syah	36.909.785.000	42.987.834.285
Jumlah Total PAD		53.700.577.428	60.814.316.979

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kab. Purworejo, September 2011

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut, maka terlihat bahwa sumber PAD yang memberikan masukan terbesar terhadap PAD tahun 2009 adalah dari sektor Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 42.987.834.285,00 atau 70,69% dari total PAD, kemudian diikuti oleh sektor retribusi daerah sebesar Rp 9.491.483.729,00 atau 15,61 % dari total PAD.

TABEL IV.3c
PAD KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2010

No	Uraian	Target	Realisasi
1.	Pajak Daerah	7.972.000.000	8.285.157.843
2.	Retribusi Daerah	13.075.868.737	11.576.322.231

3.	Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.289.097.430	2.398.632.077
4.	Lain-lain PAD yang Sah	42.988.446.602	47.349.202.139
Jumlah Total PAD		66.325.412.769	69.609.314.290

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kab. Purworejo, September 2011

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel tersebut, maka terlihat bahwa sumber PAD yang memberikan masukan terbesar terhadap PAD tahun 2010 adalah dari sektor Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 47.349.202.139,00 atau 68,02% dari total PAD, kemudian diikuti oleh sektor retribusi daerah sebesar Rp 11.576.322.231,00 atau 16,63 % dari total PAD.

Dengan memperhatikan tabel-tabel tersebut di atas, terlihat bahwa PAD Kabupaten Purworejo pada tahun 2009 dan 2010 didominasi oleh Lain-lain PAD yang sah yaitu rata-rata 69,355 % dari total PAD

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran efektivitas PAD Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2008, data yang ada akan dianalisis dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD tahun 2008}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{51.174.860.039}{42.874.969.676}$$

$$\text{Efektivitas PAD tahun 2008} = 1,19$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh rasio efektivitas PAD tahun 2008 sebesar 1,19 atau (119%), ini membuktikan bahwa penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD tahun 2008 dapat dikatakan efektif.

Selanjutnya, dengan menggunakan formula yang sama, efektivitas PAD tahun 2009 adalah

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD tahun 2009}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{60.814.316.979}{53.700.577.428}$$

$$\text{Efektivitas PAD tahun 2009} = 1,13$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh rasio efektivitas PAD tahun 2009 sebesar 1,13 atau (113%), ini membuktikan bahwa penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD tahun 2009 dapat dikatakan efektif.

Lebih lanjut, dengan menggunakan formula yang sama, efektivitas PAD tahun 2010 adalah

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD tahun 2010}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{69.609.314.290}{66.325.412.769}$$

$$\text{Efektivitas PAD tahun 2010} = 1,05$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh rasio efektivitas PAD tahun 2010 sebesar 1,05 atau (105 %), ini membuktikan bahwa penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD tahun 2010 dapat dikatakan efektif.

Dengan demikian, pada tahun 2008, 2009, dan 2010 kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas pengelolaan penerimaan keuangan daerah dapat dikategorikan efektif (rata-rata 112,33 %).

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, maka rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Purworejo, besar biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun 2008 adalah Rp 4.605.737.403,00. Berdasarkan data tersebut, maka efisiensi PAD akan dianalisis dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Efisiensi PAD tahun 2008} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

$$\text{Efisiensi PAD tahun 2008} = \frac{4.605.737.403}{51.174.860.039}$$

$$\text{Efisiensi PAD tahun 2008} = 0,09$$

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan PAD di Kabupaten Purworejo pada tahun 2008 cukup efisien, karena biaya yang dikeluarkan hanya 9% dari total PAD tahun 2008.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Purworejo, biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun 2009 adalah sebesar Rp.4.257.002.188,00. Efisiensi PAD akan dianalisis dengan menggunakan formula yang sama dengan formula untuk menganalisis efisiensi PAD tahun sebelumnya, yaitu:

$$\text{Efisiensi PAD Tahun 2009} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

$$\text{Efisiensi PAD Tahun 2009} = \frac{4.257.002.188}{60.814.316.979}$$

Efisiensi PAD = 0,07

Hasil analisis efisiensi tersebut menunjukkan bahwa pemungutan PAD pada tahun 2009 di Kabupaten Purworejo cukup efisien, karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD hanya mencapai 7 % dari total penerimaan PAD.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Purworejo, biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.4.872.652.000,00. Efisiensi PAD akan dianalisis dengan menggunakan formula yang sama dengan formula untuk menganalisis efisiensi PAD tahun sebelumnya,yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi PAD Tahun 2010} &= \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \\ \text{Efisiensi PAD Tahun 2010} &= \frac{4.872.652.000}{69.609.314.290}\end{aligned}$$

Efisiensi PAD = 0,07

Hasil analisis efisiensi terhadap penerimaan PAD tahun 2010 menunjukan bahwa biaya pemungutan PAD pada tahun 2010 di Kabupaten Purworejo cukup efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD, hanya mencapai 7 % dari total penerimaan PAD.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap efisiensi penerimaan PAD pada tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010 menunjukkan kinerja yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, khususnya dalam pengelolaan penerimaan PAD karena rata-rata tingkat efisiensinya mencapai 7,67 % per tahun.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari semua komponen PAD Kabupaten Purworejo serta persentase penerimaan per tahun dari masing-masing komponen tersebut, terlihat pada tabel kontribusi komponen PAD selama tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010.

Tabel IV.4
KONTRIBUSI KOMPONEN PAD TERHADAP TOTAL PAD
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 –2010

Tahun Anggaran	Persentase Besarnya Penerimaan Komponen PAD			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2008	12,51	67,35	2,85	17,29
2009	11,21	15,61	2,49	70,69
2010	11,90	16,63	3,45	68,02
Rata-rata	11,87	33,20	2,93	52

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo 2008-2010, diolah

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa komponen PAD yang memberikan sumbangan terbesar adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan rata-rata per tahun 52 %, kemudian berturut-turut penerimaan dari retribusi daerah dengan rata-rata per tahun 33,2 %, penerimaan pajak Daerah rata-rata 11,87 % per tahun, dan komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan sumbangan terkecil terhadap PAD secara keseluruhan sebesar rata-rata 2,93 % per tahun. Komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan sumbangan terkecil terhadap PAD menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah disebabkan rentang kendali yang sangat luas sehingga sulit untuk melakukan pemantauan terhadap aset-aset tersebut, di samping sumber daya aparatur yang dimiliki masih sangat minim.

4.3.1.2 Pertumbuhan PAD

Berdasarkan data PAD Kabupaten Purworejo, dengan menggunakan formula analisis pertumbuhan sebagaimana dikemukakan Halim (2002: 212), maka pertumbuhan PAD Kabupaten Purworejo tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100 \%$$

Keterangan :

P_n = data pada tahun ke- n

P₀ = data pada tahun ke-0

r = pertumbuhan

Dengan menggunakan formula tersebut maka pertumbuhan PAD Kabupaten Purworejo dapat dianalisis sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PAD 2009} = \frac{\text{PAD 2009} - \text{PAD 2008}}{\text{PAD 2008}} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD 2009} = \frac{60.814.316.979 - 51.174.860.039}{51.174.860.039} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD 2009} = \frac{9.639.456.940}{51.174.860.039} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD 2009} = 18,84 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD 2010} = \frac{\text{PAD 2010} - \text{PAD 2009}}{\text{PAD 2009}} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD 2010} = \frac{69.609.314.290 - 60.814.316.979}{60.814.316.979} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD 2010} = \frac{8.794.997.311}{60.814.316.979} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PAD 2010} = 14,46 \%$$

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan PAD di Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2010, maka dapat dikatakan bahwa PAD Kabupaten Purworejo pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 18,84%, sedangkan tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan PAD yang lebih rendah daripada tahun 2009 yaitu sebesar 14,46%. Gambaran secara keseluruhan tentang perkembangan pertumbuhan PAD Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel IV.5
PERTUMBUHAN PAD
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2008 – 2010

No	Tahun	PAD	Pertumbuhan
1	2008	51.174.860.039	-
2	2009	60.814.316.979	18,84
3	2010	69.609.314.290	14,46
Rata-rata		60.532.830.436	16,65

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010, diolah

Melihat kenyataan tersebut, maka usaha-usaha yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang diharapkan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan PAD antara lain adalah secara bertahap melakukan pembenahan dan penyempurnaan potensi-potensi PAD sehingga target yang ditetapkan dapat terealisasi.

4.3.1.3 Kemampuan PAD terhadap Total APBD Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data yang diperoleh dari realisasi APBD Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam nota perhitungan APBD tahun 2008 – 2009 dan target PAD tahun 2010 serta perbandingannya dengan APBD, kemampuan PAD terhadap APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.6.
KEMAMPUAN PAD DALAM APBD KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 – 2010

No	Tahun	PAD	Total APBD	Persentase PAD terhadap APBD
1	2008	51.174.860.039	1.512.079.198.026	3,38
2	2009	60.814.316.979	1.618.168.094.692	3,76
3	2010	69.609.314.290	1.730.069.563.850	4,02
Rata-rata		60.532.830.436	1.620.105.618.523	3,72

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010, diolah

Kemampuan PAD terhadap APBD rata-rata per-tahun adalah 3,72%. Melihat hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk menjalankan pemerintahannya jika tidak dibantu dengan bantuan dana dari pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo tidak mungkin membiayai pemerintahannya dengan PAD yang minim tersebut. Bila dilihat belanja daerah yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan dalam APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008 – 2010 mencapai total rata-rata per tahun Rp. 755.309.049.941,00. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa sangat tidak mungkin bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan dengan PAD.

Perincian mengenai kemampuan PAD terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.7.
KEMAMPUAN PAD TERHADAP BELANJA RUTIN DAN BELANJA
PEMBANGUNAN DALAM APBD KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 – 2010

Tahun	PAD	Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan	Persentase Belanja terhadap PAD
2008	51.174.860.039	691.991.234.560	7,39
2009	60.814.316.979	758.043.854.687	8,02
2010	69.609.314.290	815.892.060.576	8,53
Rata-rata	60.532.830.436	755.309.049.941	7,98

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010, diolah

Kemampuan rata-rata PAD per tahun terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan adalah 7,98 %. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan PAD per tahun sebesar Rp.60.532.830.436,00 sangat kecil apabila dibandingkan dengan rata-rata belanja per tahun sebesar Rp.755.309.049.941,00. Hal ini mencerminkan bahwa PAD belum dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan belanja

daerah. Rendahnya kemampuan PAD tersebut karena masih terbatasnya potensi PAD yang dikembangkan di Kabupaten Purworejo.

4.3.2. Analisis Penerimaan Keuangan Daerah dari Dana Perimbangan Keuangan

Dana Perimbangan menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat- Daerah secara garis besar terdiri atas :

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Purworejo, berikut akan disajikan gambaran penerimaan keuangan daerah Kabupaten Purworejo yang bersumber dari Dana Perimbangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.8.
DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
YANG DITERIMA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 – 2010

No	Uraian	2008	2009	2010
1	Bagi Hasil Pajak	34.581.396.879	35.088.898.486	40.235.050.644
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.385.759.424	3.562.706.475	3.434.666.443
3	Dana Alokasi Umum	515.796.414.000	526.622.715.000	528.061.281.000
4	Dana Alokasi Khusus	56.743.000.000	68.762.000.000	56.527.500.000
Jumlah		608.506.570.303	634.036.319.961	628.258.498.087

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010, diolah

Komponen Dana Perimbangan yang paling besar memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Keuangan Daerah adalah Dana Alokasi Umum, dimana rata-rata tiap tahun sebesar Rp.523.493.470.000,00, sedangkan pada posisi kedua ditempati oleh komponen Dana Alokasi Khusus yaitu rata-rata tiap tahun Rp. 60.677.500.000,00. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar sumber

penerimaan daerah Kabupaten Purworejo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), artinya berasal dari Pemerintah Pusat. Sedangkan besar kontribusi setiap komponen Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Purworejo tahun 2008 – 2010, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.9.
PERSENTASE KONTRIBUSI SETIAP KOMPONEN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP TOTAL DANA PERIMBANGAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 — 2010

Tahun Anggaran	Persentase Besarnya Penerimaan Komponen Dana Perimbangan			
	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak	DAU	DAK
2008	5,68	0,23	84,77	9,32
2009	5,53	0,56	83,06	10,85
2010	6,40	0,55	84,05	9,00
Rata-rata	5,87	0,45	83,96	9,72

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010, diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa komponen Bagi Hasil Bukan Pajak adalah komponen yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap total Dana Perimbangan dengan rata-rata per tahun 0,45 %. Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah, kecilnya bagi hasil bukan pajak karena sumber daya alam di Kabupaten Purworejo masih belum tergali secara optimal sehingga berpengaruh terhadap Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima. Sedangkan komponen Bagi Hasil Pajak rata-rata per-tahun 5,87% memberikan kontribusi terhadap total Dana Perimbangan dan relatif memiliki pertumbuhan yang fluktuatif.

Komponen Dana Alokasi Umum rata-rata memberikan kontribusi per tahun sebesar 83,96 %. Besarnya komponen Dana Alokasi Umum ini menurut Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Purworejo karena perubahan dalam struktur anggaran (meningkatnya gaji pegawai dan tunjangan, masuknya gaji guru dalam APBD).

Pada dasarnya, komponen Dana Alokasi Khusus bersifat *specific grant*. Dalam arti bahwa pengalokasiannya kepada daerah tergantung Pemerintah Pusat berdasarkan

ketersediaan dana pada APBN.

Selanjutnya akan digambarkan persentase Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Purworejo terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo. Adapun persentase Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Purworejo terhadap total Pendapatan Daerah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.10.
PERSENTASE DANA PERIMBANGAN TERHADAP
TOTAL PENDAPATAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 – 2010

NO	TAHUN ANGGARAN	TOTAL PENDAPATAN	DANA PERIMBANGAN	PERSENTASE DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN (%)
1	2008	709.357.094.616	608.506.570.303	85,78
2	2009	751.262.475.167	634.036.319.961	84,40
3	2010	802.215.304.045	628.258.498.087	78,32
Rata-rata		754.278.291.276	623.600.462.451	82,83

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010, diolah

Data tersebut memberikan bukti bahwa penerimaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo sangat bergantung pada Pemerintah Pusat atau pemerintah yang lebih tinggi karena rata-rata per tahun (82,83%) Total Penerimaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo berasal dari Dana Perimbangan Keuangan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo terhadap Dana Perimbangan sangat besar.

4.3.3. Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah Kabupaten Purworejo

Kapasitas keuangan daerah dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Penilaian kemampuan keuangan daerah tersebut

dapat dilakukan dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Penggunaan ukuran derajat desentralisasi fiskal menurut Reksohadiprojo (2000: 201) menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut.

- a. Perbandingan antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah,
- b. Perbandingan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Penerimaan Daerah.
- c. Perbandingan Antara Sumbangan Daerah (DAU/DAK) terhadap Total Penerimaan Daerah.

Dengan menggunakan ketiga perbandingan tersebut, maka dapat diketahui derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut akan dikemukakan perbandingan ketiga komponen penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Purworejo, sebagai berikut.

Tabel IV.11
PERBANDINGAN PAD, BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK, DAU dan DAK
TERHADAP TOTAL PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008-2010

Tahun	Total Pendapatan	Total PAD dan Persentase	Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Persentase	DAU/DAK dan Persentase
2008	709.357.094.616	51.174.860.039 7,2 %	35.967.156.303 5,07 %	572.539.414.000 80,71 %
2009	751.262.475.167	60.814.316.979 8,09 %	38.651.604.961 5,14 %	595.384.715.000 79,25 %
2010	802.215.304.045	69.609.314.290 8,68 %	43.669.717.087 5,44 %	584.588.781.000 72,87%
Rata-rata	754.278.291.276	60.532.830.436 7,99 %	39.429.492.784 5,22 %	584.170.970.000 77,61%

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010, diolah.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata proporsi total PAD terhadap total pendapatan yaitu sebesar Rp. 60.532.830.436,00 (7,99 %), rata-rata proporsi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak terhadap Total Pendapatan Daerah per tahun yaitu sebesar Rp 39.429.492.784,00 (5,22%), sedangkan rata-rata proporsi sumbangan daerah dari Pemerintah Pusat (DAU dan DAK) terhadap Total Pendapatan Daerah per tahun adalah sebesar Rp 584.170.970.000,00 (77,61 %). Dengan hasil tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi Fiskal selama tahun 2008 – 2010, dari segi penerimaan keuangan daerah, Kabupaten Purworejo masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar terhadap Pemerintah Pusat.

Jika derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo diukur dengan menggunakan rumusan sebagaimana dikemukakan Reksohadiprodjo maka akan diperoleh hasil sebagai berikut.

- a. Berdasarkan aspek pendapatan asli daerah, derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung sebagai berikut.

$$\frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2008} = \frac{51.174.860.039}{709.357.094.616} \times 100 \% = 7,21 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2009} = \frac{60.814.316.979}{751.262.475.167} \times 100 \% = 8,09 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2010} = \frac{69.609.314.290}{802.215.304.045} \times 100 \% = 8,68 \%$$

- b. Berdasarkan aspek penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$\frac{\text{BHPBP}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2008} = \frac{35.967.156.303}{709.357.094.616} \times 100 \% = 5,07 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2009} = \frac{38.651.604.961}{751.262.475.167} \times 100 \% = 5,14 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2010} = \frac{43.669.717.087}{802.215.304.045} \times 100 \% = 5,44 \%$$

- c. Berdasarkan sumbangan yang diterima daerah (DAU dan DAK), derajat desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut.

$$\frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2008} = \frac{572.539.414.000}{709.357.094.616} \times 100 \% = 80,71 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2009} = \frac{595.384.715.000}{751.262.475.167} \times 100 \% = 79,25 \%$$

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal tahun 2010} = \frac{584.588.781.000}{802.215.304.045} \times 100 \% = 72,87 \%$$

Dari hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal tersebut dapat dilihat tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggunakan skala interval kemampuan keuangan daerah sebagai berikut.

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Purworejo selama tahun 2008 –

2010 masih sangat kurang.

Kenyataan tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian Pemerintah Daerah, dimana kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah, menurut Halim (2002 : 128) ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya, misalnya bantuan Pemerintah Pusat ataupun dari pinjaman.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai sendiri pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Dengan demikian semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Untuk melihat tingkat kemandirian daerah Kabupaten Purworejo tahun 2008 – 2010 akan disajikan tabel perbandingan PAD terhadap sumber dana ekstern (Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK), sebagai berikut.

Tabel IV.12.
PERBANDINGAN PAD DENGAN DANA EKSTERN (DANA PERIMBANGAN)
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008– 2010

Tahun	PAD	Dana Ekstern (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK)	Persentase
2008	51.174.860.039	608.506.570.303	8,41
2009	60.814.316.979	634.036.319.961	9,59
2010	69.609.314.290	628.258.498.087	11,08
Rata-rata	60.532.830.436	623.600.462.784	9,69

Sumber : APBD Kabupaten Purworejo tahun 2008-2010,diolah

Dengan mencermati rasio/ perbandingan PAD terhadap pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Dana Perimbangan), dimana pada tahun 2008 rasio kemandirian hanya mencapai 8,41 %. Pada tahun 2009 rasio kemandirian menunjukkan 9,59 %, sedangkan tahun 2010 rasio kemandirian menunjukkan 11,08 %. Secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Purworejo hanya mencapai 9,69 % per tahun, menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan hal itu perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern baik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan memperluas kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan lain, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh pusat ataupun provinsi.

4.3.4. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dan Cara Mengatasinya

Berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Purworejo, Bupati Purworejo menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan desentralisasi fiskal secara utuh dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya Otonomi Daerah 1 Januari 2001, adalah merupakan suatu langkah maju dalam proses pendewasaan Pemerintah Daerah, karena daerah-daerah termasuk Kabupaten Purworejo turut merasakan angin segar tersebut, akan

tetapi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, tidak secara penuh menyerahkan kewenangan mengurus rumah tangga sendiri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten yang murni daerah otonom. Dalam kaitan dengan desentralisasi fiskal, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah, antara lain : tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan *fiscal gap*; kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah; lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum; Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi; belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil”.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah menjelaskan bahwa peningkatan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal menghadapi kendala sehubungan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perpajakan nasional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997, ternyata beberapa jenis pajak yang tadinya merupakan kewenangan kabupaten/kota dialihkan menjadi pajak Pemerintah Provinsi. Lebih lanjut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Purworejo menjelaskan bahwa, pengaturan kewenangan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah seperti ini dapat menimbulkan ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo pada pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan-permasalahan mendasar seputar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Purworejo, yaitu :

1. Relatif rendahnya basis pajak, retribusi daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru, namun kriterianya sangat ketat khususnya kriteria pajak daerah sehingga mengakibatkan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil manuver keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
Sebagian besar penerimaan daerah, masih berasal dari pusat dalam bentuk bantuan atau subsidi. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PAD dan daerah

mengandalkan kemampuan negosiasi terhadap pusat untuk memperoleh bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah
Pemungutan pajak di daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan PAD ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa daerah cenderung mengejar target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah
Pemungutan pajak mengalami kebocoran-kebocoran sebagai dampak dari lemahnya kemampuan aparat perencana dan pengawas keuangan

Rendahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah tersebut sejalan dengan pendapat Abdullah (2000 : 46) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi PAD bukan disebabkan karena secara struktural daerah miskin atau tidak memiliki sumber keuangan yang potensial, akan tetapi lebih banyak disebabkan sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Purworejo, Bupati Purworejo lebih lanjut menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diambil guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan .
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan.
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan.
Dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap fiskus serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Langkah-langkah kebijakan yang telah dan akan diambil tersebut, lebih lanjut menurut Bupati Purworejo adalah dalam rangka mewujudkan visi

Kabupaten Purworejo.

Langkah-langkah konkrit yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui peningkatan penerimaan keuangan daerah adalah sebagai berikut.

1). Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah

Intensifikasi PAD, adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola PAD (Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur dimana organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor/bidang pungutan (*by object*) tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi (*by function*) dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional. Dengan demikian diharapkan agar :
 - a. Dengan orientasi pada kegiatan fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah.
 - b. Sistem pengawasan menjadi lebih baik sehingga memberikan dampak ke arah peningkatan PAD, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya : peningkatan jumlah wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi, peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya, peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak daerah maupun retribusi daerah yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

2. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :

- a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan,
- b. Penyesuaian tarif,
- c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari prosedur yang ditentukan atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang dapat merugikan Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :

- a. Pengawasan dan pengendalian yuridis; dalam hal ini perlu diteliti apakah pungutan PAD tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis; Pengawasan dan pengendalian teknis menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada wajib pajak/retribusi, misalnya apakah sistem pembayaran tidak menyulitkan wajib pajak/retribusi atau apakah perlu diadakan pembayaran di tempat.
- c. Pengawasan dan pengendalian Penatausahaan; Pengawasan dan pengendalian ini lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola PAD

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan PAD, dan dapat merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia/aparatur dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah atau retribusi daerah.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dari suatu kegiatan pemungutan pendapatan daerah ini, perlu ditetapkan sasaran usaha intensifikasi dan strategi untuk mencapai usaha intensifikasi yaitu,

Pertama, menjangkau semua objek pemungutan yang sudah ada, sehingga diharapkan tidak ada objek pemungutan yang lolos atau hilang. Strategi yang dilakukan adalah melalui upaya:

- (1) membagi wilayah pemungutan menjadi wilayah-wilayah kerja atau mendekatkan jarak antara petugas dengan wajib pajak daerah atau retribusi daerah;
- (2) mengadakan pengkhususan atau spesialisasi pelayanan sesuai dengan jenis pungutan yang ditangani.

Kedua, menjangkau secara cepat dan tepat penanganan objek pemungutan yang baru, dapat ditempuh dengan cara meningkatkan tugas-tugas lapangan, dengan jalan meningkatkan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang pemungutan pendapatan daerah, melaksanakan pendataan objek-objek pendapatan yang baru, mengadakan penelitian setempat secara terus-menerus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh objek-objek pajak daerah atau retribusi daerah, *checking* dan berusaha memperoleh tambahan informasi tentang objek pajak daerah atau retribusi daerah serta meningkatkan usaha-usaha yang berhubungan dengan tugas-tugas lapangan lainnya.

Ketiga, memelihara kesepakatan tarif yang sesuai dengan kemampuan masyarakat secara relatif sehingga pemungutan pendapatan daerah tersebut tidak memberatkan wajib pajak daerah atau retribusi daerah, dilakukan dengan cara :

- (1) memberikan kekuatan tagih pada bagian penagihan, dalam arti apabila terjadi banyak tunggakan dan ternyata mengalami kesulitan dalam usaha mendorong atau menekan pelunasan pembayarannya, maka salah satu kesimpulan adalah bahwa mungkin tarif yang berlaku berada di atas daya pikul masyarakat sehingga perlu peninjauan kembali dan disesuaikan dengan daya pikul masyarakat yang sebenarnya;
- (2) selalu memperhatikan biaya pemungutan atau administrasi agar diusahakan seminim

mungkin, sehingga penjumlahannya dengan pokok pemungutannya tidak memberatkan objek pajak daerah atau retribusi daerah.

Keempat, Menyederhanakan pelayanan sehingga diperoleh pelayanan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyederhanaan ini harus didukung oleh ketertiban dalam pelayanan. Ketertiban dalam pelayanan dapat terwujud apabila sebagai pelaksana tugas didasarkan pada ketentuan yang berlaku, baik pada aspek administrasi perencanaan penerimaan, aspek realisasi penerimaan, maupun administrasi penagihan. Dalam faktor kecepatan hendaknya jangan sampai mengabaikan faktor-faktor pengamanan yang membuka peluang adanya penyimpangan-penyimpangan.

2). Ekstensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak daerah atau retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mencapai hasil yang maksimal, maka sasaran ekstensifikasi yang harus dilakukan oleh Kabupaten Purworejo adalah

Pertama, Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah.

Kedua, Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.

Ketiga, Mengadakan penelitian dan kajian guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Penerimaan Keuangan Daerah di Kabupaten Purworejo sebagian besar dananya masih bersumber dari Alokasi Pemerintah Pusat, dengan rata-rata mencapai 82,68 % per tahun sedangkan PAD hanya mencapai 7,99 % per tahun.
2. Dari segi Efektivitas dan Efisiensi PAD sudah cukup baik, ini menggambarkan kinerja yang baik dari Pemerintah Daerah.
3. Minimnya PAD disebabkan karena minimnya potensi sumber-sumber pendapatan yang dikelola sehingga PAD yang ditargetkan berdasarkan potensi yang minim akan menghasilkan realisasi PAD yang minim pula.
4. Secara keseluruhan minimnya PAD Kabupaten Purworejo menyebabkan tingkat ketergantungan yang cukup besar terhadap Pemerintah Pusat.
5. Derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Purworejo masih sangat rendah.
6. Upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang dengan memperhatikan kondisi, potensi, keragaman wilayah, peluang dan tantangan masa depan, di samping melakukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga kesempatan untuk penyalahgunaan keuangan daerah dapat diperkecil.

5.2. Saran

Wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam kerangka otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran. Berkaitan dengan aspek Penerimaan Keuangan Daerah, langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo adalah

1. Terus berupaya menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan diikuti

intensifikasi dan ekstensifikasi baik subyek maupun obyek pendapatan yang memungkinkan untuk digali secara optimal, karena salah satu penyebab minimnya PAD Kabupaten Purworejo adalah keterbatasan potensi sumber penerimaan keuangan.

2. Perlu prinsip yang harus dipegang dalam penentuan target Pendapatan dan Anggaran Belanja sebagai suatu perencanaan dan penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan potensi Daerah.
3. Perlu rencana keuangan jangka panjang yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas program dan perencanaan, dengan memperhatikan sumber dana yang terbatas.
4. Untuk menghindari ketergantungan keuangan yang besar terhadap Pemerintah Pusat, maka sudah saatnya Pemerintah Daerah untuk secara giat meningkatkan PAD sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
5. Perlu peninjauan kembali ataupun revisi beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo terutama yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, karena tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat sehingga tidak efisien terutama bila dilihat dari *cost recovery*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elmi, Bachrul.2005. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : UI Press
- Fernandez, Johanes.1992. *Mencari Bentuk Otonomi daerah dan Upaya Memacu Pembangunan Regional di Masa Depan*. Jakarta : Gramedia
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kaho, Yosef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lains.1995. *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*. Prisma Nomor 4 : 40-57
- Litvack & Seddon.1999. *Decentralization Briefing Noefing Notes*. World Bank Institute
- Mardiasmo.2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Munir, Dasril.2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI
- Musgrave & Musgrave.1991. *Public Finance : Theory and Practice*. Mc Graw Hill,Inc
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Jakarta : IIP
- Reksohadiprojo.2000. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Rasyid,Ryas.1998. *Pemerintahan yang Amanah*. Jakarta : Bina Pariwisata
- Sedarmayanti.2003. *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*.Bandung : Mandar Maju
- Syamsi.1986. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bina Aksara

Makalah

- Suwandi.2003. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Purworejo?
2. Strategi apa yang dilakukan dalam rangka pemungutan terhadap sumber- sumber pendapatan yang ada?
3. Bagaimana cara untuk meningkatkan penerimaan pendapatan (ekstensifikasi) pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu memperoleh penerimaan sesuai target (intensifikasi)?
5. Bagaimana cara dan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru (diversifikasi)?
6. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pemungutan pendapatan pada Instansi Bapak/Ibu?
7. Upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pendapatan?
9. Apakah Dana Perimbangan yang diperoleh Pemda sudah cukup untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?
10. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat?
11. Bagaimana mekanisme perhitungan Dana Alokasi Umum?
12. Berdasarkan potensi daerah yang ada apakah menurut Bapak/Ibu, Pemda dapat melakukan pinjaman?
13. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan Pemda tidak dapat melakukan pinjaman?
14. Apakah masih ada campur tangan Pemerintah Pusat dalam penentuan kebijakan menyangkut keuangan daerah? Jika ada, dalam bentuk apa dan bagaimana?

Identitas Diri		
Nama	:	Drs. ENCENG M.Si
Bidang Keahlian	:	Administrasi Pemerintah Daerah
Jabatan	:	Lektor Kepala
Unti Kerja	:	FISIP-UT
Alamat Surat	:	Jl Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang
Telepon	:	7490941 Ext.
Faksimili	:	7490941 Ext.
e-mail	:	enceng@mail.ut.ac.id

Riwayat Pendidikan		
Jenjang Pendidikan	Institusi	Tahun
S1 Administrasi Negara	UT	1991
S2 Administrasi Pemda	STPDN	2003

Riwayat Pekerjaan		
Pekerjaan	Institusi	Tahun
Guru	SD	1979 - 1993
Dosen	UT	1993 - sekarang

Riwayat Jabatan		
Jabatan	Institusi	Tahun
Koordinator Pelma	UT	1995
Ketua Prog. Adm.Perkant	UT	2000 - 2003

Karya Ilmiah		
Bentuk	Judul	Tahun
Thesis	Analisis Efektivitas Organisasi Puskesmas Situ Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang	2003
Penelitian	Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Periode 1903 – 2002	2004
	Analisis Penerimaan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo	
Makalah	Perubahan Penyelenggaraan Pemdasebagai Implikasi UU No.22 Tahun 1999	Juni 2004
	Hubungan Keuangan Pusat-daerah dalam Otonomi Luas	Juni 2004
	Revisi UU No.22 Tahun 1999 dalam Konteks Perubahan Sosial	Juli 2004

	Upaya- Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah	Agustus 2004
	Penataan Hubungan Kerja Eksekutif-Legislatif Daerah	September 2004
	Mengukur dan Menilai Kinerja Organisasi Pemda (Pendekatan dan Kemungkinan Penerapannya)	Maret 2005
	Reinventing Manajemen Pemda Menuju Pemerintahan yang baik	Juni 2005
	Pilkada Secara Langsung : Upaya mewujudkan Good Governance	April 2006
	Mengukur Kemampuan Daerah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah	Maret 2007
	Kebijakan Pengisian Jabatan Sekdes dari PNS : Permasalahan dan Solusinya	Juni 2007
Artikel	Memilih dan Memilah Pemimpin Urgensi Electronic Government	Juli 2005 Agustus 2006
	Kontroversi Netralitas PNS dalam Pilkada	Maret 2006
	Hubungan Kemandirian Belajar dan Hasil Belajar pada Pendidikan Jarak Jauh	September 2006
Buku	Kepemimpinan	2004
	Sistem Pemerintahan Daerah	2005
	Administrasi Kepegawaian	2005
	Hubungan Pusat Daerah	2007
	Pengantar Ilmu Administrasi	2007
	Pajak Bumi Bangunan	2007
	Etika Bisnis Pajak	2007
	Administrasi Pemda	2009
Pelatihan/Kursus		
Jenis Pelatihan/kursus		Tahun
PAT-UT		1999
Manajemen Pelayanan Prima		2000
Tuton		2005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Dr. Liestyodono B. Irianto, MSi.
2. NIP : 131 568 786
3. Pangkat/Gol. : Pembina/Gol IVa.
4. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala.
5. Tempat & Tgl.lahir : Salatiga, 15 Desember 1958
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Alamat/telepon : - Jl. Palem Indah II, Kav.27 Pondok Pucung, Pondok Aren
Bintaro,Tangerang 15229. Telp. 08129267215

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Tahun
1.	Sekolah dasar	Lulus 1971
2.	Sekolah Lanjutan Pertama	Lulus 1974
3.	Sekolah Lanjutan Atas	Lulus 1977
4.	S1 Administrasi Negara, Undip Semarang	Lulus 1983
5.	S2 Administrasi Publik, UI Jakarta	Lulus 1999
6.	S3 Ilmu Administrasi, Unpad Bandung	Lulus 2007

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Jabatan Fungsional

No.	Jabatan Fungsional	Tahun
1.	Asisten Ahli Madya pada FISIP-UT.	Tahun 1987
2.	Asisten Ahli pada FISIP-UT.	Tahun 1993
3.	Lektor Muda pada FISIP-UT.	Tahun 1997
4.	Lektor pada FISIP-UT.	Tahun 2001
5.	Lektor Kepala Pada FISIP-UT	Tahun 2006

2. Tugas Tambahan

No.	Tugas Tambahan	Tahun
1.	Kepala Bidang Penyimpanan Pusat Distribusi UT	Tahun 1986-1993
2.	Kepala Bidang Pengiriman pada Pusat Distribusi UT.	Tahun 1994-1997
3.	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT.	Tahun 1994-1997
4.	Pembantu Dekan II FISIP-UT.	Tahun 2001-2004

KURSUS/PELATIHAN/PENATARAN

No.	Kursus/ pelatihan/penataran	Tahun
1.	Pelatihan program akreditasi tutor UT.	Tahun 1999

2.	Pelatihan pengembangan soal UT.	Tahun 1999
3.	Pelatihan pengajaran melalui WEB di UT.	Tahun 1999
4.	Pelatihan pengajaran melalui WEB di UT.	Tahun 1999
5.	Penataran manajemen pelayanan prima.	Tahun 2000
6.	Pelatihan penelitian kaji tindak (Action Research)	Tahun 2000
7.	,Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP selama 46 jam diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas).	Tahun 2000

KARYA ILMIAH

No.	Judul Artikel	Media / Tahun
1	Meningkatkan produktivitas Bank Soal FISIP-UT dengan komputerisasi.	Tahun 2000, Makalah
2	Kualitas Pelayanan, suatu telaah pustaka.	Tahun 2000, Makalah
3	Hubungan Keuangan Pusat-Daerah	Tahun 2000, Modul
4	Prospek penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.	Tahun 2000, Modul
5	Naskah radio: Anggaran dan permasalahannya, Bantuan Luar Negeri.	Tahun 2000, Naskah radio
6	Penganggaran.	Tahun 2001/ RRI
7	Efektivitas Organisasi dan Kualitas Pelayanan kemahasiswaan di UT.	Tahun 2001, Penelitian
8	Pengembang materi suplemen yang didistribusikan melalui World Wide Web matakuliah Pengembangan Organisasi .	Tahun 2001
9	Administrasi Keuangan Publik	Tahun 2003, Naskah Multimedia S2 MAP - UT
10	Analisis Kebijakan Publik	Tahun 2003, Naskah Multimedia S2 MAP - UT
11	Administrasi Keuangan Publik	Tahun 2004, Buku panduan S2 - MAP
12	Analisis Kebijakan Publik.	Tahun 2004, Buku panduan S2 - MAP

No.	Judul Artikel	Media / Tahun
		- UT
13	Analisis Kebijakan Publik.	Tahun 2004, Penelaah Modul S2 - MAP - UT
14	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jurnal Kebijakan Publik / Jan-Maret 2005
15	Peran SDM Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance	Jurnal Kebijakan Publik / Juli-Sept. 2005
16	Paradigma Baru Dalam Administrasi Negara Indonesia	Jurnal Kebijakan Publik / Jan-Maret 2006
17	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Publik	Jurnal Kebijakan Publik / April-Juni 2006
18	Pendekatan dan Pengukuran Efektivitas Organisasi Publik	Jurnal Kebijakan Publik / Jan – Maret 2007

SEMINAR, LOKAKARYA, SIMPOSIUM, DLL.

No.	Seminar/Lokakarya/Simposium	Tahun
1	Otonomi Daerah, Pemakalah Wisuda IV UT	1999
2	Pemakalah pada seminar pendidikan II Lemlit UT	1999
3	Kelayakan Program Kearsipan. Pemakalah UT	1999
4	Komputerisasi Bank Soal FISIP - UT. Pemakalah	2000
5	Peserta Seminar Nasional Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Tegal.	2000
6	Seminar Intern Tentang Otonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemakalah UT	2000
7	Peserta Rapat Koordinasi Nasional UT.	2000
8	Ruang lingkup materi Matakuliah Pengembangan Organisasi. Pemakalah UT	2001
9	Pengembangan Organisasi, Pemakalah UT	2001
10	Sistem Jaminan Kualitas, Peserta Rakornas UT	2002
11	Makna Administrasi. Pemakalah UT	2003
12	Pokok-pokok Penyusunan APBD	2003
13	Pengukuran Kualitas pelayanan. Pemakalah UT	2004

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Pengabdian Masyarakat	Tahun
1	Penyuluhan Keterampilan Manajerial aparatur Desa	2000
2	Sebagai Kontributor Pada Kegiatan Menuju <i>Good</i>	2001

No.	Pengabdian Masyarakat	Tahun
	<i>Governance</i> Ditinjau dari Perspektif ISO.	
3	Survei Pendapatan Potensi di Terminal & Pasar Cicurug	2002
4	Peserta Pelatihan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	2002

MENGAJAR/ TUTOR

No.	Mengajar / Tutor	Kelas
1.	Mata kuliah Administrasi Keuangan	S1
2	Matakuliah Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.	S1
3	Matakuliah Pengembangan Organisasi.	S1
4	Matakuliah Administrasi Keuangan Publik	S2
	Matakuliah Analisis Kebijakan Publik	S2

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Pengalaman Organisasi	Tahun
1	Anggota Senat FISIP-UT	Tahun 1997-2000
2	Anggota Senat FISIP-UT	Tahun 2000-2004
3	Anggota Senat Universitas wakil dosen.	Tahun 2000-2004
4	Anggota Tim Baperjakat UT	Tahun 2000-2004
5	Ketua panitia pemilihan Dekan FISIP-UT.	Tahun 2001
6	Ketua Tim penyusunan pedoman kebijakan UT.	Tahun 2002

PENGHARGAAN

No.	Penghargaan	Tahun
1	Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	(Keppres No. 018/TK/Tahun/2005)
2	Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	(Keppres No. 011/TK/Tahun/2007)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Purwaningdyah Murti Wahyuni,SH,Mhum
2. NIP : 19600304 198603 2 001
3. Tempat & Tanggal lahir : Purworejo, 4 Maret 1960
4. Jenis Kelamin : Wanita
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Agama : Islam
7. Golongan/ Pangkat : Pembina Tk I/IVb
8. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
9. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
10. Alamat : Jalan Cabe Raya Pondok Cabe Pamulang
15418
11. Telp/Faks : (021) 7490941
12. Alamat Rumah : Bukit Pamulang Indah F 4 No 1 Pamulang
15417
13. Telp/Faks : (021) 7428401/ (021) 7428401
14. Email : purwaningdyah@ut.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan
1983	S1	Universitas GadjahMada Yogyakarta	Hukum Agraria
2003	S2	Universitas GadjahMada Yogyakarta	Hukum Bisnis

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara	Jangka Waktu
2000	Produksi dan Pengembangan Program Audio/Video	UT	3 hari
2001	Tutorial Elektronik	UT	3 hari
2001	Pelayanan Prima	UT	3 hari

2002	PAT-UT	UT	4 hari
2006	Evaluasi soal ujian	UT	3 hari
2006	Penulisan Bahan Ajar Cetak	UT	3 hari
2006	Evaluasi Bahan Ajar	UT	3 hari
2006	Nasional Dosen Matakuliah Pendidikan Kewatganegaraan	Dikti di Surabaya	4 hari
2007	Penulisan Karya Ilmiah	Dikti di Jakarta	4 hari
2009	Pengelolaan Keuangan	UT	3 hari
2010	Pelatihan Penelitian	UT 3-6 Pebruari 2010	4 hari
2010	Orientasi Kepala dan Koordinator UPBJJ	UT 17-19 Maret 2010	3 hari
2010	Meningkatkan Kualitas pemimpin di dalam diri	UT	1 hari
2010	Peningkatan Kualitas Tutor	UT 14-16 Juli 2010	3 hari
2011	Rakernas akademik dalam pelatihan penulisan artikel/jurnal ilmiah	UT 17 – 20 Januari 2011	4 hari

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jurusan/ Program Studi	Tahun
Administrasi Pertanahan	S1	Ilmu Administrasi	1986 – 2008
Hukum Komersial	S1	Manajemen	2003 – 2008

Pajak Bumi dan Bangunan	D3	Perpajakan	1986 – sekarang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	D3	Perpajakan	2000 – 2008
Kepabeanan dan Cukai	D3	Perpajakan	2000 – 2008

PRODUK BAHAN AJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar	Tahun
BMP Pajak Bumi dan Bangunan(tim)	D3	Cetak	2003
BMP Kepemimpinan (tim)	S1	Cetak	2005
BMP Hukum Ketenagakerjaan(tim)	S1	Cetak	2007
BMP Etika Bisnis dalam Perpajakan(tim)	D3	Cetak	2008
BMP Pajak Bumi dan Bangunan(tim)	D3	Cetak	2008
BMP Administrasi Pertanahan (tim)	S1	Cetak	2009

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul	Ketua/anggota	Sumber dana
2005	Tracer Studi PS D3 Perpajakan	Ketua	Universitas Terbuka
2006	Studi Kelayakan Pembukaan PS Ilmu Hukum	Anggota	Universitas Terbuka

2007	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah	Ketua	Universitas Terbuka
2007	Peran Yayasan dalam pengelolaan bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta (Studi kasus pada wilayah Tangerang dan Jakarta Selatan)	Anggota	Universitas Terbuka
2008	Peningkatan Potensi Penerimaan PBB	Ketua	Universitas Terbuka
2008	Peningkatan penerimaan BPHTB	Anggota	Universitas Terbuka
2009	Peran serta Pengurus Daerah terhadap Kualitas pelaksanaan tutorial di UPBJJ UT Padang	Anggota	Universitas Terbuka
2010	Dimensi Servqual UPBJJ UT (studi kasus UPBJJ-UT Padang)	Anggota	Universitas Terbuka
2010	Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya layanan pendaftaran tanah pertama sporadic (studi kasus Kota Padang)	Ketua	Universitas Terbuka

KARYA ILMIAH

Buku

Tahun	Judul	Jenis	No
2004	Perlindungan Konsumen dalam bisnis properti di bidang Perumahan	Bunga rampai FISIP UT	ISBN 979-689-703-2
2005	Tinjauan Yuridis tentang pelaksanaan Hukum	Bunga Rampai FISIP UT	ISBN 979-689-840-3

	Kepailitan		
2006	Sertifikat Sebagai Bukti Jaminan Kepastian Hukum	Bunga Rampai FISIP UT	ISBN 979-689-893-4
2006	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Bunga Rampai FISIP UT	ISBN 979-689-955-8

Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit /Jurnal
Maret 2002	Reklamasi Pantai dalam Hubungannya dengan Pendaftaran Tanah, Studi Kasus di Pantai Utara Jakarta	Jurnal Studi Indonesia, Vol 12 No 1
Maret 2005	Perubahan Hak Guna Bangunan ke Hak Milik untuk rumah yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah	Jurnal Studi Indonesia, Vol 15 No 1
Mei 2008	Kajian Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota	Jurnal Ekonomi Media Ilmiah Indonusa, Vol 13 No 1 ISSN 0853-8522
Juni 2008	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance	Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN Vol 2 No 1 , ISSN 1978-7103.
April 2011	Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah kabupaten/Kota	Jurnal administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Volume 9 No 1, ISSN 1412-825K

Juni 2011	Menyusun Kompensasi PNS Berbasis Kinerja	Civil Service, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol 5, No 1 ISSN 1978-7103, 243/Akred-LIPI/P2MBI/05/2010
-----------	--	---

Makalah

Tahun	Judul	Penyelenggara
2009	Eksistensi Guru sebagai Pengontrol Media Tanpa Batas	Seminar Nasional FKIP UT
2011	Syariah VS Konvensional dalam akses pembiayaan bagi masyarakat	Seminar Nasional FEKON UT
2011	Regulasi dan dampak pengembangan perbankan syariah di Indonesia	Seminar Nasional FEKON UT
2011	Investasi Keuangan Perbankan Syariah, mengapa tidak?	Seminar Nasional FEKON UT
2011	Demokrasi Otonomi Daerah: Kolaborasi Pemerintahan Pusat dan Kearifan Lokal	Seminar Nasional FISIP UT
2011	The Improvement of Academic Quality at Universitas Terbuka Indonesia	AAOU Penang Malaysia

Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2011	Universitas Terbuka Towards Distance Education Based On Character	ICDE Bali
2011	Remove Traditional Pattern Payment Concern Modern Pattern Payment	ICDE Bali